



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur maka telah dilakukan penataan organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor : B/251/M.SM.04.00/2018 tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Belitung Timur perlu menetapkan Kelas Jabatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Nomor: B/251/M.SM.04.00/2018 Tanggal 20 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
4. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang berasal dari hasil analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan sumber-sumber lain.

**BAB II
KELAS JABATAN**

Pasal 2

- (1) Kelas Jabatan disusun melalui proses Evaluasi Jabatan.
- (2) Hasil Evaluasi Jabatan sebagaimana ayat (1) berupa:
 - a. nilai dan kelas jabatan struktural bagi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan pengawas; dan
 - b. nilai dan kelas jabatan fungsional tertentu/jabatan fungsional umum bagi jabatan pelaksana.

Pasal 3

- (1) Kelas dan Nilai Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Kelas dan Nilai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Kelas dan Nilai Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan PNS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan jika ada:
 - a. perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;
 - b. penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; atau
 - c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh OPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menyertakan Informasi Faktor Jabatan yang memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. peran jabatan;
 - c. uraian tugas dan tanggung jawab;
 - d. hasil kerja jabatan;
 - e. tingkat faktor; dan
 - f. persyaratan jabatan tertentu.
- (4) Informasi Faktor Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan dan/atau penambahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 September 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 26 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

PIH. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH

NIP. 19830529 201001 1 014

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**KELAS DAN NILAI JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN
PENGAWASDI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NO	JABATAN PIMPINAN TINGGI	KELAS	NILAI JABATAN
1.	Sekretaris Daerah	15	3555
2.	Asisten Pemerintahan dan Sosial	14	3030
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	14	3030
4.	Asisten Administrasi Umum	14	3030
5.	Sekretaris DPRD	14	2865
6.	Inspektur	14	3030
7.	Kepala Dinas Pendidikan	14	2865
8.	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	2865
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	2865
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	2865
11.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	2865
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	2865
13.	Kepala Dinas Perikanan	14	2865
14.	Kepala Dinas Perhubungan	14	2865
15.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	14	2865
16.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	14	2865
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	14	2865
18.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	14	2865
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	2865
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	2865
21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	2865
22.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14	2865
23.	Kepala Dinas Perpustakaan	14	2865
24.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	2865
25.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	3030
26.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14	3030
27.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	2865
28.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	13	2715
29.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan	13	2715
30.	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	13	2715
31.	Kepala Bagian Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	12	2315
32.	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama	12	2315

33.	Kepala Bagian Perckonomian dan Pembangunan	12	2315
34.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	2315
35.	Kepala Bagian Hukum	12	2315
36.	Kepala Bagian Organisasi	12	2315
37.	Kepala Bagian Umum	12	2315
38.	Sekretaris Inspektorat	12	2140
39.	Sekretaris Dinas Pendidikan	12	2115
40.	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	2115
41.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	2115
42.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12	2115
43.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	2115
44.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	2115
45.	Sekretaris Dinas Perikanan	12	2115
46.	Sekretaris Dinas Perhubungan	12	2115
47.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12	2115
48.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	12	2115
49.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan	12	2115
50.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan	12	2115
51.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	2115
52.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	12	2115
53.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12	2115
54.	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12	2115
55.	Sekretaris Dinas Perpustakaan	12	2115
56.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	2115
57.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	2140
58.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	12	2140
59.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	2115
60.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	12	2315
61.	Camat	12	2315
62.	Kepala Bagian Umum	11	2090
63.	Kepala Bagian Persidangan	11	2090
64.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	11	2090
65.	Kepala Bagian Keuangan	11	2090
66.	Inspektur Pembantu Wilayah I	11	1990
67.	Inspektur Pembantu Wilayah II	11	1990
68.	Inspektur Pembantu Wilayah III	11	1990
69.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat	11	2045
70.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	11	2045
71.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	11	2045

72.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	11	2045
73.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	2045
74.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	2045
75.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	11	2045
76.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	11	2045
77.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11	1910
78.	Kepala Bidang Bina Marga	11	2045
79.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	11	2045
80.	Kepala Bidang Cipta Karya	11	2045
81.	Kepala Bidang Penataan Ruang	11	2045
82.	Kepala Bidang Penataan Perumahan	11	2045
83.	Kepala Bidang Penataan Kawasan Permukiman	11	2045
84.	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga	11	2045
85.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	11	2045
86.	Kepala Bidang Penataan, Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa	11	2045
87.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	11	2045
88.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	2045
89.	Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11	2045
90.	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah	11	2045
91.	Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Wilayah Pesisir	11	2045
92.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan	11	2045
93.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	11	2045
94.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	11	2045
95.	Kepala Bidang Angkutan Jalan	11	2045
96.	Kepala Bidang Pelayaran	11	2045
97.	Kepala Bidang Pengembangan Bakat Olahraga dan Prestasi	11	2045
98.	Kepala Bidang Pembudidayaan Olahraga dan Pengembangan Sarana dan Prasarana	11	2045
99.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan	11	2045
100.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	11	2045
101.	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	11	2045
102.	Kepala Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	11	2045
103.	Kepala Bidang Promosi dan Perencanaan Penanaman Modal	11	2045
104.	Kepala Bidang Pengendalian, Informasi dan Dokumentasi	11	2045
105.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan	11	2045
106.	Kepala Bidang Perdagangan	11	2045
107.	Kepala Bidang Perindustrian	11	2045
108.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	11	2045

109.	Kepala Bidang Perkebunan	11	2045
110.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	11	2045
111.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	11	2045
112.	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian	11	2045
113.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk	11	2045
114.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	2045
115.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	2045
116.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	2045
117.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	11	2045
118.	Kepala Bidang Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	11	2045
119.	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	11	2045
120.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan	11	2045
121.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	11	2045
122.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	11	2045
123.	Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11	2045
124.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata	11	2045
125.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Pariwisata	11	2045
126.	Kepala Bidang Kebudayaan	11	2045
127.	Kepala Bidang Perpustakaan	11	2090
128.	Kepala Bidang Kearsipan	11	2045
129.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11	2045
130.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah	11	2045
131.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	11	2045
132.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	11	2045
133.	Kepala Bidang Anggaran	11	2045
134.	Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak	11	2045
135.	Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak	11	2045
136.	Kepala Bidang Perbendaharaan	11	2045
137.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	11	2045
138.	Kepala Bidang Kekayaan Daerah	11	2045
139.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur	11	2045
140.	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur	11	2045
141.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur	11	2045
142.	Sekretaris Camat	11	2090
143.	Kepala Sub Bagian Koordinasi Sosial Kemasyarakatan	9	1430
144.	Kepala Sub Bagian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	9	1430
145.	Kepala Sub Bagian Koordinasi Dokumentasi dan Informasi	9	1430
146.	Kepala Sub Bagian Kerja Sama Daerah	9	1430
147.	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Perangkat Kewilayahan	9	1430

148.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Tugas Pembantuan	9	1430
149.	Kepala Sub Bagian Koordinasi Ekonomi I	9	1430
150.	Kepala Sub Bagian Koordinasi Ekonomi II	9	1430
151.	Kepala Sub Bagian Koordinasi Pembangunan	9	1430
152.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pembinaan Kebijakan dan Pengaduan	9	1430
153.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah	9	1430
154.	Kepala Sub Bagian Tata Hukum	9	1430
155.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan	9	1430
156.	Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja	9	1430
157.	Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik	9	1430
158.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9	1430
159.	Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	9	1430
160.	Kepala Sub Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	9	1430
161.	Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol	9	1430
162.	Kepala Sub Bagian Persidangan	9	1430
163.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	9	1430
164.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	1430
165.	Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan	9	1430
166.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	9	1430
167.	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	9	1430
168.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
169.	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	9	1430
170.	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kursus	9	1430
171.	Kepala Seksi Program, Data dan Prasarana	9	1430
172.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	9	1430
173.	Kepala Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu	9	1430
174.	Kepala Seksi Program, Data dan Prasarana	9	1430
175.	Kepala Seksi Kurikulum	9	1430
176.	Kepala Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu	9	1430
177.	Kepala Seksi Program, Data dan Prasarana	9	1430
178.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat	9	1430
179.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	9	1430
180.	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	9	1430
181.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
182.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	9	1430
183.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	9	1430
184.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Lingkungan Kerja dan Olahraga	9	1430
185.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	9	1430
186.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	9	1430
187.	Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	9	1430
188.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	9	1430

189.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan	9	1430
190.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Kesehatan	9	1430
191.	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	9	1430
192.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh dan Kader Keluarga Berencana	9	1430
193.	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	9	1430
194.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	9	1430
195.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
196.	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	9	1430
197.	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9	1430
198.	Kepala Seksi Peralatan dan Laboratorium	9	1430
199.	Kepala Seksi Pengelolaan Irigasi dan Jaringan Pemanfaatan Air	9	1430
200.	Kepala Seksi Pengelolaan Jaring Sumber Air	9	1430
201.	Kepala Seksi Penataan Bangunan	9	1430
202.	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	9	1430
203.	Kepala Seksi Penataan Drainase	9	1430
204.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang	9	1430
205.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	9	1430
206.	Kepala Seksi Pertanahan	9	1430
207.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	9	1430
208.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan	9	1430
209.	Kepala Seksi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan	9	1430
210.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman	9	1430
211.	Kepala Seksi Penyediaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	9	1430
212.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
213.	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga	9	1430
214.	Kepala Seksi Kerja Sama dan Administrasi Pemerintahan Desa	9	1430
215.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kemasyarakatan	9	1430
216.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender	9	1430
217.	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga	9	1430
218.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	9	1430
219.	Kepala Seksi Operasional Penegakan Produk Hukum Daerah	9	1430
220.	Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan	9	1430
221.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	9	1430
222.	Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil	9	1430
223.	Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir	9	1430
224.	Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil	9	1430
225.	Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir	9	1430
226.	Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	9	1430
227.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	9	1430
228.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	9	1430

229.	Kepala Perlengkapan Jalan	9	1430
230.	Kepala Seksi Keselamatan dan Pengujian Kendaraan Bermotor	9	1430
231.	Kepala Angkutan Dalam Trayek dan Terminal	9	1430
232.	Kepala Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Barang	9	1430
233.	Kepala Seksi Kepelabuhanan	9	1430
234.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	9	1430
235.	Kepala Seksi Pembibitan dan Pemanduan Bakat Olahraga dan Prestasi	9	1430
236.	Kepala Seksi Pembinaan Bakat Olahraga Pendidikan dan Prestasi	9	1430
237.	Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Industri Olahraga	9	1430
238.	Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	9	1430
239.	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda	9	1430
240.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	9	1430
241.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	9	1430
242.	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Kehumasan	9	1430
243.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	9	1430
244.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	9	1430
245.	Kepala Seksi Layanan e-Government	9	1430
246.	Kepala Seksi Statistik dan Pengelolaan Data	9	1430
247.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
248.	Kepala Seksi Promosi dan Kerja Sama Investasi	9	1430
249.	Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal dan Penanganan Pengaduan	9	1430
250.	Kepala Seksi Perizinan Dasar dan Non Perizinan	9	1430
251.	Kepala Seksi Perizinan Usaha	9	1430
252.	Kepala Seksi Bina Usaha dan Distribusi Perdagangan	9	1430
253.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan	9	1430
254.	Kepala Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen	9	1430
255.	Kepala Seksi Industri Pangan, Sandang dan Aneka	9	1430
256.	Kepala Seksi Industri Kerajinan, Logam dan Kimia	9	1430
257.	Kepala Seksi Pengembangan Wilayah Industri	9	1430
258.	Kepala UPT Pengelola Pasar	9	1430
259.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
260.	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	9	1430
261.	Kepala Seksi Produksi dan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura	9	1430
262.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	9	1430
263.	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	9	1430
264.	Kepala Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan	9	1430
265.	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	9	1430
266.	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	9	1430
267.	Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	9	1430
268.	Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan	9	1430

269.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	9	1430
270.	Kepala UPT Balai Perbenihan Tanaman	9	1430
271.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
272.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
273.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	9	1430
274.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	9	1430
275.	Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan	9	1430
276.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	9	1430
277.	Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	9	1430
278.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	9	1430
279.	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	9	1430
280.	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	9	1430
281.	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan	9	1430
282.	Kepala Seksi Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9	1430
283.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	1430
284.	Kepala Seksi Usaha dan Promosi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9	1430
285.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
286.	Kepala Seksi Destinasi Wisata	9	1430
287.	Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata	9	1430
288.	Kepala Seksi Kelembagaan Pariwisata	9	1430
289.	Kepala Seksi Kesenian	9	1430
290.	Kepala Seksi Warisan dan Tradisi	9	1430
291.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	9	1430
292.	Kepala Seksi Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	9	1430
293.	Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	9	1430
294.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	9	1430
295.	Kepala Seksi Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip	9	1430
296.	Kepala Sekretariat Pelaksana	9	1430
297.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	9	1430
298.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	9	1430
299.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
300.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan	9	1430
301.	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	9	1430
302.	Kepala Sub Bidang Sosial, Ekonomi, dan Pemerintahan	9	1430
303.	Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	9	1430
304.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan	9	1430
305.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia	9	1430
306.	Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	9	1430
307.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	9	1430

308.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1430
309.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	9	1430
310.	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	9	1430
311.	Kepala Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak	9	1430
312.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak	9	1430
313.	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan	9	1430
314.	Kepala Sub Bidang Pengawasan Pemeriksaan dan Pelaporan	9	1430
315.	Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung	9	1430
316.	Kepala Sub Bidang Belanja Langsung	9	1430
317.	Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan	9	1430
318.	Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan	9	1430
319.	Kepala Sub Bidang Pertanggungjawaban dan Informasi Keuangan Daerah	9	1430
320.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian	9	1430
321.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan	9	1430
322.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Penatausahaan	9	1430
323.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	9	1430
324.	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian	9	1430
325.	Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitas Profesi Aparatur Sipil Negara	9	1430
326.	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan	9	1430
327.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi Aparatur	9	1430
328.	Kepala Sub Bidang Penjenjangan, Sertifikasi dan Teknis Fungsional	9	1430
329.	Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur	9	1430
330.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	1430
331.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa	9	1430
332.	Kepala Seksi Pembinaan Politik dan Masyarakat	9	1430
333.	Kepala Seksi Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Masyarakat	9	1430
334.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Kecamatan	9	1455
335.	Kepala Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Sistem	8	1295
336.	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	8	1295
337.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	8	1295
338.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	8	1295
339.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	1295
340.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	8	1295
341.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1295
342.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	1295
343.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1295
344.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	1295
345.	Kepala Seksi Jaminan Ber-Keluarga Berencana	8	1295
346.	Kepala Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana	8	1295
347.	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	8	1295

348.	Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan	8	1295
349.	Kepala Seksi Penunjang	8	1295
350.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	8	1295
351.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1295
352.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	1295
353.	Kepala UPT Pengelolaan Air Minum	8	1295
354.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Air Minum	8	1295
355.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	8	1295
356.	Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana Sosial dan Alam	8	1295
357.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin	8	1295
358.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	8	1295
359.	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	8	1295
360.	Kepala Seksi Penataan Desa	8	1295
361.	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat	8	1295
362.	Kepala Seksi Perlindungan Hak Anak dan Sistem Data Gender	8	1295
363.	Kepala Seksi Operasional Pengendalian dan Ketertiban Umum	8	1295
364.	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	8	1295
365.	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan	8	1295
366.	Kepala UPT Balai Perikanan Budidaya	8	1295
367.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Perikanan Budidaya	8	1295
368.	Kepala UPT Pengolahan Hasil Perikanan	8	1295
369.	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Perairan	8	1295
370.	Kepala Seksi Olahraga Rekreasi, Kemasyarakatan dan Layanan Khusus	8	1295
371.	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi	8	1295
372.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	8	1295
373.	Kepala Seksi Dokumentasi, Data dan Informasi	8	1295
374.	Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran	8	1295
375.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	8	1295
376.	Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	8	1295
377.	Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi	8	1295
378.	Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	8	1295
379.	Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian	8	1295
380.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8	1295
381.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	8	1295
382.	Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	8	1295
383.	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	8	1295

384.	Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	8	1295
385.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	8	1295
386.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	8	1295
387.	Kepala Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	8	1295
388.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	8	1295
389.	Kepala Seksi Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan	8	1295
390.	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah	8	1295
391.	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	8	1295
392.	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	8	1295
393.	Kepala Seksi Pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	1295
396.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	8	1295
397.	Kepala Seksi Industri Pariwisata	8	1295
398.	Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Sejarah dan Permuseuman	8	1295
399.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	8	1295
400.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan	8	1320
401.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1320
402.	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8	1320
403.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	8	1320
404.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	8	1320
405.	Kepala Seksi Pelayanan	8	1320

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

RIK KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH

NIP. 19830529 201001 1 014

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KELAS DAN NILAI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	NILAI JABATAN
1.	Dokter Madya	12	2225
2.	Dokter Gigi Madya	12	2225
3.	Analisis Kebijakan Madya	12	2135
4.	Auditor Madya	11	1930
5.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya	11	1930
6.	Guru Madya	11	1960
7.	Pamong Belajar Madya	11	1930
8.	Penilik Madya	11	1930
9.	Pengawas Sekolah Madya	11	1960
10.	Apoteker Madya	11	1945
11.	Bidan Madya	11	1930
12.	Nutrisionis Madya	11	1930
13.	Perawat Madya	11	1960
14.	Penata Ruang Madya	11	1930
15.	Teknisi Jalan dan Jembatan Madya	11	1975
16.	Penyuluh Pertanian Madya	11	2030
17.	Perencana Madya	11	1930
18.	Dokter Muda	10	1720
19.	Dokter Gigi Muda	10	1670
20.	Analisis Kebijakan Muda	10	1735
21.	Auditor Muda	9	1355
22.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda	9	1355
23.	Guru Muda	9	1385
24.	Pamong Belajar Muda	9	1355
25.	Penilik Muda	9	1355
26.	Pengawas Sekolah Muda	9	1385
27.	Apoteker Muda	9	1370
28.	Bidan Muda	9	1355
29.	Dokter Pertama	9	1570
30.	Dokter Gigi Pertama	9	1370
31.	Fisioterapis Muda	9	1555
32.	Perawat Muda	9	1385
33.	Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1355
34.	Penata Ruang Muda	9	1355
35.	Teknisi Jalan dan Jembatan Muda	9	1400
36.	Penyuluh Pertanian Muda	9	1385
37.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda	9	1355

38.	Analisis Ketahanan Pangan Muda	9	1355
39.	Perencana Muda	9	1355
40.	Statistisi Muda	9	1355
41.	Analisis Kepegawaian Muda	9	1355
42.	Analisis Kebijakan Pertama	8	1280
43.	Analisis Kepegawaian Pertama	8	1280
44.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	8	1310
45.	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8	1280
46.	Auditor Pertama	8	1280
47.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama	8	1280
48.	Guru Pertama	8	1280
49.	Pamong Belajar Pertama	8	1280
50.	Penilik Pertama	8	1280
51.	Pengawas Sekolah Pertama	8	1310
52.	Pranata Komputer Penyelia	8	1230
53.	Pranata Komputer Pertama	8	1280
54.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1310
55.	Apoteker Pertama	8	1295
56.	Asisten Apoteker Penyelia	8	1245
57.	Bidan Penyelia	8	1230
58.	Bidan Pertama	8	1280
59.	Fisioterapis Penyelia	8	1230
60.	Nutrisisionis Penyelia	8	1230
61.	Nutrisisionis Pertama	8	1280
62.	Perawat Penyelia	8	1260
63.	Perawat Pertama	8	1310
64.	Perawat Gigi Penyelia	8	1260
65.	Perekam Medis Pertama	8	1260
66.	Pranata Komputer Pertama	8	1280
67.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1230
68.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	1280
69.	Radiografer Medis Penyelia	8	1260
70.	Sanitarian Penyelia	8	1245
71.	Penata Ruang Pertama	8	1280
72.	Teknisi Jalan dan Jembatan Pertama	8	1325
73.	Teknik Tata Bangunan Pertama	8	1325
74.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	8	1280
75.	Polisi Pamong Praja Penyelia	8	1320
76.	Penyuluh Perikanan Pertama	8	1310
77.	Pengawas Perikanan Pertama	8	1280
78.	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	1260
79.	Statistisi Pertama	8	1280
80.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pertama	8	1280
81.	Penguji Mutu Barang Pertama	8	1295
82.	Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1260
83.	Penyuluh Pertanian Pertama	8	1310
84.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	8	1280
85.	Medik Veteriner Ahli Pertama	8	1280

86.	Pengawas Mutu Pakan Pertama	8	1280
87.	Analisis Ketahanan Pangan Pertama	8	1280
88.	Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	8	1310
89.	Pengantar Kerja Pertama	8	1280
90.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	8	1280
91.	Mediator Hubungan Industrial Pertama	8	1280
92.	Arsiparis Pertama	8	1280
93.	Pustakawan Pertama	8	1280
94.	Perencana Pertama	8	1280
95.	Peneliti Pertama	8	1280
96.	Penata Ruang Pertama	8	1280
97.	Analisis Kepegawaian Pertama	8	1280
98.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	1005
99.	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1005
100.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	1005
101.	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1020
102.	Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1005
103.	Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	1005
104.	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	7	1005
105.	Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1035
106.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1005
107.	Radiografer Medis Pelaksana Lanjutan	7	1035
108.	Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1020
109.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	1005
110.	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	7	1095
111.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	7	1035
112.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	1005
113.	Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	1035
114.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1005
115.	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	7	1005
116.	Penyuluh Pajak Pelaksana Lanjutan	7	1005
117.	Analisis Kepegawaian Pelaksana	6	740
118.	Pranata Komputer Pelaksana	6	740
119.	Arsiparis Pelaksana	6	740
120.	Asisten Apoteker Pelaksana	6	755
121.	Bidan Pelaksana	6	740
122.	Fisioterapis Pelaksana	6	740
123.	Nutrisisionis Pelaksana	6	740
124.	Perawat Gigi Pelaksana	6	770
125.	Perekam Medis Pelaksana	6	770
126.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	740
127.	Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770
128.	Sanitarian Pelaksana	6	755
129.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana	6	805
130.	Polisi Pamong Praja Pelaksana	6	745
131.	Pengawas Perikanan Pelaksana	6	740
132.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6	770
133.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana	6	740
134.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Pelaksana	6	770

135.	Pencera Pelaksana	6	740
136.	Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	770
137.	Pengawas Bibit Ternak Pelaksana	6	740
138.	Instruktur Pelaksana	6	740
139.	Pamong Budaya Pelaksana	6	740
140.	Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	505
141.	Bidan Pelaksana Pemula	5	490
142.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Pemula	5	540
143.	Sanitarian Pelaksana Pemula	5	505
144.	Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	570

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH
NIP. 19830529 201001 1 014

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KELAS DAN NILAI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	JABATAN	KELAS	NILAI JABATAN
1.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	7	890
2.	Analisis Kerja Sama	7	890
3.	Pengelola Perangkat Kecamatan	7	890
4.	Analisis Perekonomian	7	890
5.	Analisis Program Pembangunan	7	890
6.	Penyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	7	890
7.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa	7	890
8.	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	7	890
9.	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	7	890
10.	Analisis Jabatan	7	890
11.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7	890
12.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
13.	Bendahara	7	890
14.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
15.	Analisis Produk Hukum	7	890
16.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
17.	Analisis Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	7	890
18.	Analisis Kursus dan Pelatihan	7	890
19.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	7	890
20.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	890
21.	Analisis Mutu Pendidikan	7	890
22.	Analisis Kualifikasi dan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan	7	890
23.	Pemeriksa Sanitasi	7	890
24.	Analisis Kesehatan	7	890
25.	Analisis Kesehatan Kerja	7	890
26.	Analisis Kimia	7	890
27.	Analisis Data dan Informasi	7	890
28.	Penyusun Penyuluh Keluarga Berencana	7	890
29.	Penyuluh Kemasyarakatan	7	890
30.	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	890
31.	Analisis Sarana Pelayanan	7	890
32.	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana	7	890
33.	Penyusun Bahan Kesertaan Keluarga Berencana	7	890
34.	Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	7	890
35.	Pemeriksa Anggaran	7	890
36.	Pemeriksa Pelaporan dan Transaksi Keuangan	7	890

NO	JABATAN	KELAS	NILAI JABATAN
37.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
38.	Analisis Jalan dan Jembatan	7	890
39.	Penelaah Pengelolaan Leger Jalan	7	890
40.	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	890
41.	Analisis Jalan Jembatan	7	890
42.	Pemeriksa Jalan dan Jembatan	7	890
43.	Penelaah Bahan Jalan	7	890
44.	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	7	890
45.	Pengawas Irigasi	7	890
46.	Analisis Pengembangan Infrastruktur	7	890
47.	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	890
48.	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7	890
49.	Pengawas Bangunan dan Gedung	7	890
50.	Penata Penyehatan Lingkungan Pemukiman	7	890
51.	Penyusun Rencana Tata Ruang	7	890
52.	Analisis Tata Ruang	7	890
53.	Pengawas Tata Ruang	7	890
54.	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	890
55.	Analisis Hukum Pertanahan	7	890
56.	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	7	890
57.	Pengawas Fisik Permukiman	7	890
58.	Analisis Pembangunan	7	890
59.	Pengawas Fisik Permukiman	7	890
60.	Penyusun Pemberian Bantuan Teknis	7	890
61.	Penyusun Bahan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	7	890
62.	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	7	890
63.	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	7	890
64.	Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	7	890
65.	Penggerak Swadaya Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	1005
66.	Petugas Penindakan	7	890
67.	Penyidik	7	890
68.	Penyuluh Kemasyarakatan	7	890
69.	Pengembang Program Penyuluhan	7	890
70.	Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	7	890
71.	Analisis Kenelayanan	7	890
72.	Analisis Pendaftaran Kapal Perikanan	7	890
73.	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	7	890
74.	Analisis Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir	7	890
75.	Penyusun Rencana Pemanfaatan Jenis Ikan	7	890
76.	Analisis Mutu Hasil Perikanan	7	890
77.	Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan	7	890
78.	Analisis Perikanan Budidaya	7	890
79.	Penyusun Rekayasa Lalu Lintas	7	890
80.	Penyusun Kebutuhan Perlengkapan Jalan	7	890

NO	JABATAN	KELAS	NILAI JABATAN
81.	Pengawas Keselamatan Darat/Jalan	7	890
82.	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	7	890
83.	Pengawas Angkutan dan Terminal	7	890
84.	Pengawas dan Pembina Angkutan	7	890
85.	Pengawas Olahraga	7	890
86.	Penyuluh Olahraga	7	890
87.	Analisis Keolahragaan	7	890
88.	Analisis Kepemudaan	7	890
89.	Penyuluh Kepemudaan	7	890
90.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
91.	Pemeriksa Teknologi Informasi	7	890
92.	Penyusun Rencana Promosi	7	890
93.	Penyusun Rencana Permodalan	7	890
94.	Analisis Bidang Pengawasan	7	890
95.	Analisis Dokumen Perizinan	7	890
96.	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	7	890
97.	Penyusun Rencana Bahan Teknis Produksi	7	890
98.	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Manajemen Mutu Produksi	7	890
99.	Pengawas Industri	7	890
100.	Penelaah Data Sumber Benih	7	890
101.	Penata Dokumen Hasil Produksi	7	890
102.	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian	7	890
103.	Penelaah Data Sertifikasi Mutu Benih/Bibit	7	890
104.	Analisis Pengelola Data Komoditas Perkebunan	7	890
105.	Penata Dokumen Hasil Produksi	7	890
106.	Pengawas Penyakit dan Pengendali Hewan	7	890
107.	Pengawas Hygiene, Sanitasi Usaha Peternakan dan Kesehatan Masyarakat	7	890
108.	Pengawas Harga Pangan	7	890
109.	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	7	890
110.	Analisis Kapasitas Penyuluh	7	890
111.	Analisis Lingkungan Hidup	7	890
112.	Penelaah Dampak Lingkungan	7	890
113.	Penyuluh Lingkungan Hidup	7	890
114.	Pengembang Program Penyuluhan	7	890
115.	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	7	890
116.	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	7	890
117.	Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	7	890
118.	Analisis Kimia	7	890
119.	Peneliti Laboratorium	7	890
120.	Instruktur Vokasional	7	890
121.	Analisis Kompetensi dan Kualifikasi Ketenagaan	7	890
122.	Analisis Tenaga Kerja	7	890
123.	Analisis Penempatan Tenaga Kerja	7	890

NO	JABATAN	KELAS	NILAI JABATAN
124.	Penyuluh Tenaga Kerja	7	890
125.	Penyuluh Koperasi	7	890
126.	Analisis Bimbingan Usaha	7	890
127.	Penelaah Pengembangan Usaha	7	890
128.	Analisis Objek Wisata	7	890
129.	Penyusun Promosi dan Kerja Sama	7	890
130.	Penyuluh Wisata	7	890
131.	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	7	890
132.	Analisis Warisan Budaya	7	890
133.	Penyuluh Perpustakaan	7	890
134.	Penata Laporan Keuangan	7	890
135.	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7	890
136.	Penyelidik Geologi	7	890
137.	Penyuluh Bencana	7	890
138.	Konselor	7	890
139.	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	7	890
140.	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	7	890
141.	Analisis Kebijakan Pelaksanaan Anggaran	7	890
142.	Penata Laporan Keuangan	7	890
143.	Analisis Pengelolaan Keuangan	7	890
144.	Penyusun Rencana Mutasi	7	890
145.	Penyusun Rencana Promosi	7	890
146.	Analisis Program Diklat	7	890
147.	Analisis Fasilitasi dan Peningkatan Kompetensi	7	890
148.	Analisis Kelembagaan Masyarakat	7	890
149.	Analisis Politik Dalam Negeri	7	890
150.	Analisis Narkoba	7	890
151.	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	690
152.	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6	690
153.	Pengelola Penyelenggara Otonomi Daerah	6	690
154.	Pengolah Data Ekonomi	6	690
155.	Pengolah Data	6	690
156.	Pengelola LPSE	6	690
157.	Pranata Barang dan Jasa	6	690
158.	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	690
159.	Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum	6	690
160.	Pengolah Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum	6	690
161.	Pengolah Data Kelembagaan	6	690
162.	Pengelola Akuntabilitas	6	690
163.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
164.	Pengelola Bangunan Gedung	6	690
165.	Pengelola Kendaraan	6	690
166.	Notulis Rapat	6	690
167.	Tenaga Peliputan	6	690
168.	Sekretaris	6	690
169.	Arsiparis Pelaksana	6	690

NO	JABATAN	KELAS	NILAI JABATAN
170.	Pranata Komputer Pelaksana	6	690
171.	Arsiparis Pelaksana	6	690
172.	Pranata Komputer Pelaksana	6	690
173.	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	6	690
174.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
175.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
176.	Pengelola Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini	6	690
177.	Pengelola Data Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	690
178.	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	6	690
179.	Pengelola Data Mutu Pendidikan	6	690
180.	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	6	690
181.	Pengelola Data Mutu Pendidikan	6	690
182.	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	6	690
183.	Pengelola Data Tenaga Kependidikan	6	690
184.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
185.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
186.	Pengelola Program Gizi	6	690
187.	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	6	690
188.	Pengelola Penggerak Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	6	690
189.	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	6	690
190.	Pengelola Program Imunisasi	6	690
191.	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	6	690
192.	Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	6	690
193.	Pengelola Penyakit Tidak Menular	6	690
194.	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	6	690
195.	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	690
196.	Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan	6	690
197.	Pengelola Kefarmasian	6	690
198.	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	690
199.	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	6	690
200.	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6	690
201.	Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana	6	690
202.	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	6	690
203.	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	690
204.	Pengelola Keperawatan	6	690
205.	Pengelola Poliklinik	6	690
206.	Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan	6	690
207.	Pengelola Pelayanan Penunjang Diagnostik dan Logistik	6	690
208.	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	690
209.	Pengelola Data Investigasi Internal	6	690
210.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
211.	Pengelola Keperawatan	6	690

NO	JABATAN	KELAS	NILAI JABATAN
212.	Pengelola Program Gizi	6	690
213.	Pengelola Program Imunisasi	6	690
214.	Pengelola Rujukan Kesehatan	6	690
215.	Pengelola Kebidanan	6	690
216.	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	690
217.	Pengelola Pemeliharaan Jaringan Irigasi	6	690
218.	Pengelola Inspeksi Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	690
219.	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan	6	690
220.	Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air	6	690
221.	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6	690
222.	Pengelola Data Penatagunaan Tanah	6	690
223.	Koordinator Pergudangan	6	690
224.	Pengelola Rehabilitasi Sosial	6	690
225.	Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia	6	690
226.	Pranata Bencana	6	690
227.	Pengelola Data Bantuan Sosial	6	690
228.	Pengelola Pembinaan Bantuan	6	690
229.	Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan	6	690
230.	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	6	690
231.	Pengelola Data Komunitas Adat	6	690
232.	Pengelola Bimbingan Sosial	6	690
233.	Pengelola Data Bimbingan dan Konseling	6	690
234.	Pengelola Kekayaan dan Administrasi Desa	6	690
235.	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	6	690
236.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	690
237.	Pengelola Informasi dan Kerja Sama	6	690
238.	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	690
239.	Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	6	690
240.	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	6	690
241.	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	690
242.	Pengelola Data Belanja dan Laporan Keuangan	6	690
243.	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	690
244.	Pengelola Pengendalian Masyarakat	6	690
245.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690
246.	Pranata Perlindungan Masyarakat	6	690
247.	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	6	690
248.	Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	6	690
249.	Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan	6	690
250.	Pengelola Bangunan Gedung	6	690
251.	Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan	6	690
252.	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	690
253.	Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan	6	690

NO	JABATAN	KELAS	NILAI JABATAN
254.	Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan	6	690
255.	Pengelola Statistik Perikanan	6	690
256.	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	690
257.	Pengelola Pengawasan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan	6	690
258.	Pengelola Statistik Perikanan	6	690
259.	Pengelola Pelaksanaan Pengujian Mutu Secara Laboratoris Terhadap Produk Hasil Perikanan	6	690
260.	Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	6	690
261.	Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Ikan	6	690
262.	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	6	690
263.	Pengelola Pelaksanaan Pengujian Mutu Secara Laboratoris Terhadap Produk Hasil Perikanan	6	690
264.	Pengelola Terminal	6	690
265.	Pengelola Sarana Angkutan	6	690
266.	Pengelola Sarana Angkutan	6	690
267.	Pengelola Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	6	690
268.	Pengelola Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	690
269.	Pengelola Manajemen Transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	6	690
270.	Pengelola Data	6	690
271.	Pengolah Data	6	690
272.	Pengelola Pengaduan Publik	6	690
273.	Jurnalis	6	690
274.	Tenaga Peliputan	6	690
275.	Pengelola Jaringan Telekomunikasi	6	690
276.	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	690
277.	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik	6	690
278.	Pengelola Situs/Web	6	690
279.	Pranata Alat Persandian	6	690
280.	Operator Sandi dan Telekomunikasi	6	690
281.	Operator Transmisi Sandi	6	690
282.	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	6	690
283.	Pengelola Data Statistik	6	690
284.	Pranata Humas Pelaksana	6	740
285.	Pranata Komputer Pelaksana	6	740
286.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
287.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
288.	Pengelola Kerja Sama	6	690
289.	Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor	6	690
290.	Pengelola Pengaduan Publik	6	690
291.	Pengelola Dokumentasi	6	690
292.	Pengelola Dokumen Perizinan	6	690
293.	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	6	690

NO	JABATAN	KELAS	NILAI JABATAN
294.	Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen	6	690
295.	Pengelola Pasar	6	690
296.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
297.	Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	6	690
298.	Pengelola Teknologi Perbenihan	6	690
299.	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	690
300.	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Saran dan Prasarana Pertanian	6	690
301.	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	690
302.	Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	6	690
303.	Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan/Perkebunan	6	690
304.	Pengelola Penilai Usaha Perkebunan	6	690
305.	Pengelola Data Pasca Panen	6	690
306.	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya	6	690
307.	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	6	690
308.	Pengelola Rumah Potong Hewan	6	690
309.	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6	690
310.	Pengelola Ketahanan Pangan	6	690
311.	Pengelola Pola Pangan Harapan	6	690
312.	Pengelola Database Kelembagaan Petani	6	690
313.	Pengelola Program Penyuluhan	6	690
314.	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	6	690
315.	Pengelola Teknologi Perbenihan	6	690
316.	Penguji Coba Perbibitan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	690
317.	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690
318.	Pranata Laporan Keuangan	6	690
319.	Pengelola Data Pelayanan	6	690
320.	Pengelola Mutasi Penduduk	6	690
321.	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi Data	6	690
322.	Pengolah Data Administrasi dan Verifikasi Data	6	690
323.	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6	690
324.	Pengalih Media	6	690
325.	Pengelola Informasi Lingkungan	6	690
326.	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	6	690
327.	Pengelola Dokumen Mengenai Dampak Lingkungan	6	690
328.	Pengelola Sampah	6	690
329.	Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	690
330.	Pengelola Pengaduan Publik	6	690
331.	Pengelola Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup	6	690
332.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
333.	Pengelola Tenaga Kerja	6	690
334.	Pengelola Kebijakan Kelembagaan	6	690

NO	JABATAN	KELAS	NILAI JABATAN
335.	Pranata Koperasi	6	690
336.	Pengelola Data Kreatifitas dan Inovasi	6	690
337.	Pengelola Permodalan Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah	6	690
338.	Pengelola Objek Wisata	6	690
339.	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	6	690
340.	Pengolah Data Kelembagaan	6	690
341.	Pengelola Data Warisan Budaya	6	690
342.	Pengelola Data Sejarah	6	690
343.	Pengelola Cagar Budaya dan Koleksi Museum	6	690
344.	Pengelola Bahan Pustaka	6	690
345.	Pengelola Pustaka Elektronik	6	690
346.	Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana	6	690
347.	Pranata Pemadam Kebakaran	6	690
348.	Pranata Laporan Keuangan	6	690
349.	Pengelola Pelaksanaan Program dan Anggaran	6	690
350.	Pengelola Penelitian	6	690
351.	Verifikator Anggaran	6	690
352.	Pengelola Data Pendataan, Pemetaan dan Penilaian	6	690
353.	Pengolah Data dan Potensi Pajak	6	690
354.	Pengelola Data dan Informasi Perpajakan	6	690
355.	Pengolah Data Penagihan Pajak	6	690
356.	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	6	690
357.	Verifikator Keuangan	6	690
358.	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan	6	690
359.	Pengelola Laporan Keuangan Daerah	6	690
360.	Koordinator Pergudangan	6	690
361.	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6	690
362.	Pengelola Disiplin Pegawai	6	690
363.	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	690
364.	Pengelola Kepegawaian	6	690
365.	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	690
366.	Pengelola Data Program Pengembangan Tenaga Teknis dan Fungsional Non-Teknis	6	690
367.	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690
368.	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	690
369.	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690
370.	Pengolah Data Pelayanan	6	690
371.	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490
372.	Pengadministrasi Umum	5	490
373.	Pengadministrasi LPSE	5	490
374.	Pengadministrasi Umum	5	490
375.	Pengadministrasi Hukum	5	490
376.	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
377.	Petugas Protokol	5	490

NO	JABATAN	KELAS	NILAI JABATAN
378.	Pemelihara Kendaraan	5	490
379.	Pengadministrasi Keuangan	5	490
380.	Pengadministrasi Rapat	5	490
381.	Pengadministrasi Risalah	5	490
382.	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan	5	490
383.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490
384.	Pengadministrasi Kurikulum	5	490
385.	Pengadministrasi Program Pemberantasan Penyakit Menular	5	490
386.	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	490
387.	Pengadministrasi Tugas Belajar/Izin Belajar	5	490
388.	Pengadministrasi Pelatihan	5	490
389.	Binatu Rumah Sakit	5	490
390.	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	490
391.	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	490
392.	Juru Rawat Jenazah	5	490
393.	Pemelihara Peralatan	5	490
394.	Teknisi Keciptakarya	5	490
395.	Teknisi Air	5	490
396.	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	490
397.	Kartografer	5	490
398.	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	5	490
399.	Penagih Retribusi	5	490
400.	Juru Survey Permukiman Perumahan	5	490
401.	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial	5	490
402.	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	5	490
403.	Ajudan	5	490
404.	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	5	490
405.	Teknisi Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	490
406.	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	490
407.	Teknisi Konservasi	5	490
408.	Pengadministrasi LLAJ	5	490
409.	Operator Terminal	5	490
410.	Pengadministrasi Kinerja Operasional Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	5	490
411.	Juru Pungut Retribusi	5	490
412.	Pelatih Atlet Disable	5	490
413.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490
414.	Teknisi Jaringan Instalasi	5	490
415.	Pengadministrasi Perizinan	5	490
416.	Perawat Ternak	5	490
417.	Pengadministrasi Koleksi Tumbuhan	5	490
418.	Pengadministrasi Kependudukan	5	490
419.	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan Anak	5	490
420.	Juru Informasi dan Komunikasi	5	490

NO	JABATAN	KELAS	NILAI JABATAN
421.	Juru Pungut Kebersihan	5	490
422.	Pengadministrasi Pajak	5	490
423.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490
424.	Pemandu Wisata	5	490
425.	Pengadministrasi Izin Usaha Pariwisata	5	490
426.	Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah	5	490
427.	Pengadministrasi Perpustakaan	5	490
428.	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	5	490
429.	Pengadministrasi Anggaran	5	490
430.	Pengadministrasi Pajak	5	490
431.	Pengadministrasi Pertanahan	5	490
432.	Pengadministrasi Perizinan	5	490
433.	Pengemudi	3	340
434.	Petugas Keamanan	3	340
435.	Pramu Bakti	1	190
436.	Pramu Kebersihan	1	190

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

PI. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH

NIP. 19830529 201001 1 014